

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN  
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL  
NOMOR 122/KEP/G3/2022  
TENTANG

KUALIFIKASI PENDIDIKAN DALAM PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH  
DENGAN PERJANJIAN KERJA PADA JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH  
KELUARGA BERENCANA

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

- Menimbang
- a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional mendapatkan formasi jabatan fungsional penyuluh keluarga berencana melalui pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas yang terukur dalam memenuhi kebutuhan jabatan fungsional penyuluh keluarga berencana dibutuhkan kualifikasi Pendidikan yang relevan dalam pengelolaan program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Kualifikasi Pendidikan Dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Pada Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
5. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Jenis Jabatan Yang Dapat Diisi Oleh Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 65);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 209);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 656);
9. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Taka Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 703);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG KUALIFIKASI PENDIDIKAN DALAM PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA PADA JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KELUARGA BERENCANA.

KESATU : Menetapkan Kualifikasi Pendidikan Dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Pada Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana yang selanjutnya

*st 19/10/21*

dalam Keputusan ini disebut Kualifikasi Pendidikan P3K JF Penyuluh KB sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kualifikasi Pendidikan P3K JF Penyuluh KB sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU sesuai jenjang pendidikan Strata 1 (S1)/Diploma 4 (D4) atau Diploma 3 (D3).

KETIGA : Jenjang Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana dalam formasi Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja terdiri atas:

- a. Penyuluh KB Ahli Pertama/Pertama dengan kualifikasi Pendidikan Strata 1 (S1)/Diploma 4 (D4); dan
- b. Penyuluh KB Terampil/Pelaksana dengan kualifikasi Pendidikan Diploma 3 (D3).

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal, 5 Agustus 2022

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN  
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,



HASTO WARDOYO

Ati.7

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN  
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL  
NOMOR 122/KEP/G3/2022  
TENTANG  
KUALIFIKASI PENDIDIKAN DALAM PENGADAAN  
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN  
KERJA PADA JABATAN FUNGSIONAL  
PENYULUH KELUARGA BERENCANA

<b>NO</b>	<b>KUALIFIKASI PENDIDIKAN</b>
1.	Teknik Sipil
2.	Teknik Lingkungan
3.	Teknik Elektro
4.	Teknik Arsitektur
5.	Teknik dan Informatika
6.	Teknik Geodesi
7.	Teknik Fisika
8.	Teknik Lingkungan
9.	Teknik Kelautan
10.	Teknik Industri
11.	Teknik Kimia
12.	Teknik Metalurgi dan Material
13.	Teknik Mesin
14.	Teknik Pertambangan
15.	Teknik Informatika Komputer
16.	Ilmu Komputer dan Informatika
17.	Teknik Mekanik
18.	Teknik Komputer dan Jaringan
19.	Ilmu Kesejahteraan Keluarga
20.	Ilmu Keluarga
21.	Konsentrasi Sumber Daya Manusia
22.	Kimia Analis
23.	Pendidikan Teknik Elektro

*Handwritten signature*



<b>NO</b>	<b>KUALIFIKASI PENDIDIKAN</b>
24.	Arsitektur Lansekap
25.	Teknik Arsitek
26.	Ilmu Teknologi Pengolahan Perikanan
27.	Ilmu Geografi
28.	Teknik
29.	Teknik Telekomunikasi
30.	Teknologi Informasi
31.	Statistika Terapan
32.	Teknik Komputer
33.	Kimia Tekstil
34.	Teknik Perminyakan
35.	Pendidikan Tata Rias dan Kecantikan
36.	Manajemen Perhotelan
37.	Tata Busana
38.	Tata Boga
39.	Pariwisata
40.	Teknologi Industri Pertanian
41.	Pertanian
42.	Perbankan Syariah
43.	Ekonomi Akuntansi
44.	Ekonomi Islam
45.	Manajemen Sumber Daya Manusia
46.	Manajemen Bisnis
47.	Ekonomi Pembangunan
48.	Ilmu Ekonomi Manajemen
49.	Ilmu Ekonomi
50.	Ekonomi Sumber Daya
51.	Ilmu Manajemen
52.	Ilmu Manajemen Pemasaran
53.	Kesekretariatan Ekonomi
54.	Ekonomi Syari'ah
55.	Keuangan Daerah
56.	Perpajakan
57.	Manajemen Informasi

*Handwritten signature or mark*

NO	KUALIFIKASI PENDIDIKAN
58.	Manajemen Administrasi
59.	Administrasi Bisnis
60.	Ilmu Akuntansi
61.	Ilmu Administrasi Niaga
62.	Ilmu Administrasi Negara
63.	Ilmu Administrasi Publik
64.	Ilmu Pembangunan
65.	Manajemen Keuangan dan Perbankan
66.	Akuntansi
67.	Agama dan Filsafat
68.	Ilmu Agama
69.	Sosiologi Agama
70.	Sosiologi
71.	Sosiologi Pedesaan
72.	Ilmu Antropologi
73.	Antropologi Sosial
74.	Psikologi Umum
75.	Tasawuf Psikoterapi
76.	Ilmu Hadits
77.	Ilmu Al-Quran dan Tafsir
78.	Perbandingan Agama/ Studi Agama- Agama
79.	Aqidah dan Filsafat
80.	Dirasat Islamiyah
81.	Hukum Keluarga Islam
82.	Bimbingan dan Konseling Islam
83.	Ahwalusyakhsyah Hukum Keluarga
84.	Muamalat/Ekonomi Islam
85.	Bimbingan Konseling Islam (BKI)
86.	Bimbingan Penyuluh Islam
87.	Manajemen Ahwal Asy Syakhsyiyah (Hukum Keluarga)
88.	Hukum Kekeluargaan
89.	Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)

Zahid Ali

<b>NO</b>	<b>KUALIFIKASI PENDIDIKAN</b>
90.	Tarbiyah
91.	Tadris Bahasa Inggris
92.	Tadris Matematika/Pendidikan Matematika
93.	Tadris/Pendidikan Biologi
94.	Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
95.	Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam
96.	Pendidikan Sejarah
97.	Pendidikan Kewarganegaraan
98.	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
99.	Pendidikan Geografi
100.	Pendidikan Ekonomi
101.	Pendidikan Ekonomi Pembangunan
102.	Pendidikan Fisika
103.	Pendidikan Kimia
104.	Pendidikan Biologi
105.	Pendidikan Matematika
106.	Pendidikan Teknik Bangunan
107.	Pendidikan Teknik Informatika
108.	Pendidikan Teknologi Informasi
109.	Teknologi Pendidikan
110.	Pendidikan Tata Rias dan Kecantikan
111.	Pendidikan Bahasa
112.	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
113.	Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah
114.	Pendidikan Bahasa Prancis
115.	Pendidikan Bahasa Jepang
116.	Pendidikan Bahasa Inggris
117.	Pendidikan Bahasa Arab
118.	Pendidikan Luar Biasa
119.	Pendidikan Jasmani dan Rohani
120.	Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi
121.	Pendidikan Kepelatihan Olahraga
122.	Pendidikan Guru (PG) PAUD
123.	Pendidikan Guru (PG) SD

94/1/1



NO	KUALIFIKASI PENDIDIKAN
124.	Pendidikan SD
125.	Pendidikan Guru Taman Kanak-Kanak
126.	Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI)
127.	Pendidikan Seni Tari Keagamaan Hindu
128.	Pendidikan Bahasa Bali
129.	Bahasa Bali
130.	Ilmu Pendidikan Lingkungan
131.	Ilmu Pendidikan Bimbingan dan Konseling
132.	Ilmu Pendidikan Non Formal
133.	Ilmu Pendidikan Masyarakat
134.	Ilmu Pendidikan Anak Usia Dini
135.	Pendidikan Agama
136.	Administrasi Pendidikan
137.	Pendidikan Bimbingan Konseling
138.	Pendidikan Teknik Boga
139.	Pendidikan Ekonomi Manajemen
140.	Bahasa Inggris
141.	Pendidikan Keagamaan Buddha
142.	Pendidikan Keagamaan Hindu
143.	Pendidikan Agama Islam
144.	Pendidikan Keagamaan Katolik
145.	Pendidikan Keagamaan Kristen
146.	Pendidikan Akuntansi
147.	Program Sarjana Kependidikan Guru dalam Jabatan (PSKGJ) Kurikulum dan Teknologi Pendidikan
148.	Kimia
149.	Geofisika
150.	Fisika
151.	Matematika
152.	Desain Fashion
153.	Kriya Seni
154.	Desain Interior
155.	Desain Produk
156.	Desain Grafis

*Handwritten signature*

<b>NO</b>	<b>KUALIFIKASI PENDIDIKAN</b>
157.	Desain Komunikasi Visual
158.	Ilmu Desain
159.	Ilmu Design Terapan
160.	Ilmu Multimedia
161.	Seni Rupa Murni
162.	Seni
163.	Ilmu Sejarah
164.	Sastra Jepang
165.	Sastra Belanda
166.	Sastra Jerman
167.	Sastra Inggris
168.	Sastra Arab
169.	Sastra Indonesia
170.	Sastra Daerah
171.	Informasi Publik
172.	Arsip
173.	Agribisnis
174.	Perikanan dan Kelautan
175.	Hama dan Penyakit Tumbuhan
176.	Pertanian dan Manajemen Sumber Daya Perairan
177.	Agroteknologi
178.	Teknologi Pangan Dan Gizi
179.	Pemanfaatan Sumberdaya perikanan
180.	Teknologi Pertanian
181.	Peternakan
182.	Ilmu Peternakan
183.	Produksi Ternak
184.	Ilmu Biologi
185.	Kehutanan
186.	Manajemen hutan dan Budi daya hutan
187.	Pertanian dan Teknologi Hasil Hutan
188.	Administrasi Kebijakan Kesehatan
189.	Epidiomologi Kesehatan
190.	Sistem Informasi Kesehatan

et (1/10)

NO	KUALIFIKASI PENDIDIKAN
191.	Promosi Kesehatan
192.	Ilmu Kesehatan
193.	Ilmu Kesehatan Masyarakat
194.	Ilmu Kesehatan Lingkungan
195.	Ilmu Kebidanan
196.	Ilmu Keperawatan
197.	Ilmu Kedokteran
198.	Keperawatan Gigi
199.	Fisioterapi
200.	Ilmu Gizi
201.	Ilmu Gizi Masyarakat
202.	Hukum
203.	Hukum Islam
204.	Hukum Pidana Islam/Jinayah
205.	Perbandingan Madzhab dan Hukum
206.	Muamalah
207.	Ilmu Perpustakaan
208.	Konsentrasi Ilmu Politik
209.	Ilmu Politik Sosial
210.	Ilmu Sains Politik
211.	Ilmu Sosiatri
212.	Pekerjaan Sosial
213.	Ilmu Kesejahteraan Sosial
214.	Pembangunan Sosial
215.	Pembangunan Masyarakat
216.	Ilmu Kependudukan
217.	Demografi
218.	Ilmu Pemerintahan
219.	Kebijakan Publik
220.	Studi Pembangunan
221.	Ilmu Perencanaan Wilayah
222.	Ilmu Perencanaan Wilayah dan Pedesaan
223.	Ilmu Perencanaan Wilayah dan Kota
224.	Televisi dan Film

st (16)

NO	KUALIFIKASI PENDIDIKAN
225.	Jurnalistik
226.	Sistem Informasi
227.	Manajemen Informatika
228.	Komunikasi, Televisi dan radio
229.	Jurnalistik Islam
230.	Hubungan Masyarakat
231.	Ilmu Komunikasi
232.	Komunikasi Hubungan masyarakat
233.	Komunikasi Massa
234.	Komunikasi Pembangunan
235.	Komunikasi Penyiaran Islam
236.	Manajemen Media dan Komunikasi
237.	Manajemen Komunikasi
238.	SAINS
239.	Sains Terapan
240.	MIPA
241.	Farmasi
242.	Perkapalan, Perikanan dan Kelautan
243.	Sejarah dan Peradaban Islam
244.	Ketata Laksanakan Pelayaran Nigaya (KPN)
245.	Keuangan dan Perbankan
246.	Teknik Pertambangan
247.	Ilmu Keolahragaan

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN  
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,



HASTO WARDOYO *[Signature]*

*[Handwritten mark]*